

KARAKTERISTIK DEMOGRAFI DAN SOSIAL-EKONOMI PENERIMA MANFAAT BANTUAN PANGAN RASTRA DAN BPNT DI INDONESIA

Muhammad Iqbal Fardian^{1)*}

^{1)*}Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
m.iqbal.fardian@gmail.com

ABSTRACT : The purpose of this study were to determine the demographic and socio-economic characteristics of households as beneficiary group (KPM) of Rice Welfare Food Assistance (RASTRA) and Non-Cash Food Assistance (BPNT) in Indonesia. The design used is descriptive to calculate the cross tabulation of household characteristics (descriptive statistics). The sample in this study is Poor Households (RTM) from KPM RASTRA and BPNT within the target framework of census block sample in the National Socio-Economic Survey (SUSENAS) KOR and consumption panel in March 2019 with the multi-stage sampling method. The results showed that the demographic and socio-economic characteristics of KPM RASTRA and BPNT did not differ much, only in terms of age, KPM RASTRA was still of a productive age while KPM BPNT had entered an unproductive age and main occupation of the head of household KPM RASTRA in the agricultural sector while KPM BPNT in the non-agricultural sector. In general, the demographic characteristics of KPM RASTRA and BPNT are majority male as the head of the household and are married, have an average number of household members like a core family, have an average education of elementary school graduates, and live in rural areas. While the socio-economic characteristics of KPM RASTRA and BPNT the majority have a floor area where household members live that is suitable for habitation, do not have access to inclusive finance, and employment status of the head of household is informal.

Keywords : RASTRA, BPNT, Demographic, Social-Economic Characteristic, SUSENAS.

ABSTRAK : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik demografi dan sosial-ekonomi rumah tangga sebagai Kelompok Penerima Manfaat (KPM) bantuan pangan Beras Kesejahteraan (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Indonesia. Desain yang digunakan bersifat deskriptif untuk menghitung tabulasi silang karakteristik rumah tangga dalam bentuk tabel (statistik deskriptif). Sampel dalam penelitian ini adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) dari KPM bantuan pangan RASTRA dan BPNT dalam kerangka target sampel blok sensus dalam Survey Sosial Ekonomi Nasional KOR dan Panel Konsumsi Maret 2019 dengan metode *multi stage sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik demografi dan sosial-ekonomi dari KPM RASTRA dan BPNT tidak begitu memiliki perbedaan, hanya dari sisi usia pada KPM RASTRA masih pada usia produktif sedangkan KPM BPNT sudah memasuki usia tidak produktif dan bidang pekerjaan utama kepala rumah tangga KPM RASTRA di sektor pertanian sedangkan KPM BPNT di sektor non-pertanian. Secara umum, karakteristik demografi KPM RASTRA dan BPNT mayoritas adalah laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan telah menikah, memiliki rata-rata jumlah anggota rumah tangga layaknya keluarga inti, rata-rata tamatan SD, dan bertempat tinggal di Perdesaan. Sedangkan karakteristik sosial-ekonomi KPM RASTRA dan BPNT mayoritas memiliki luas lantai tempat tinggal anggota rumah tangga telah layak huni, tidak memiliki akses terhadap keuangan inklusif, dan status pekerjaan kepala rumah tangga adalah informal.

Kata Kunci : RASTRA, BPNT, Demografi, Karakteristik Sosial-Ekonomi, SUSENAS.

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah kompleks sehingga memerlukan program penanganan dan kebijaksanaan secara terpadu dan berkelanjutan. Kemiskinan adalah suatu keadaan yang

menyangkut ketidakmampuan dalam memenuhi tuntutan kebutuhan dalam kehidupan paling minimum (*basic needs*), khususnya dari aspek konsumsi dan pendapatan. Kemiskinan juga merupakan permasalahan multi aspek baik *cross sectors*, *cross areas*, dan *cross generation* (Baneerje, *et al.*, 2006; Sumarto & Silva, 2014). Untuk mensukseskan berbagai program dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dibutuhkan *political will* dan intervensi kebijakan pemerintah (TNP2K, 2019). Kemiskinan sangatlah kompleks dan bersifat multi dimensi, berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Kemiskinan selalu menjadi masalah multi aspek di berbagai negara sehingga memerlukan solusi yang multi dimensi pula (Alkire & Foster, 2011). Bahkan, kemiskinan menjadi salah satu agenda penting dalam *Sustainable Development Goals (SDG's)* pada akhir tahun 2015 (World Bank, 2017).

Tabel 1. Beberapa Indikator Kemiskinan Daerah di Indonesia Tahun 2017-2019

Wilayah	Tahun	Kota	Desa	Kota+Desa
Garis Kemiskinan (Rupiah)	2019	442.062	404.398	425.250
	2018	415.614	383.908	401.220
	2017	385.621	361.496	374.478
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Wilayah (Juta Jiwa)	2019	9,99	15,15	25,14
	2018	10,14	15,81	25,95
	2017	10,67	17,10	27,77
Persentase Penduduk Miskin Menurut Wilayah (Persen)	2019	6,69	12,85	9,41
	2018	7,02	13,20	9,82
	2017	7,72	13,93	10,64
Indeks Kedalaman Kemiskinan	2019	1,05	2,18	1,55
	2018	1,17	2,37	1,71
	2017	1,24	2,49	1,83
Indeks Keparahan Kemiskinan	2019	0,24	0,55	0,37
	2018	0,29	0,63	0,44
	2017	0,31	0,67	0,48

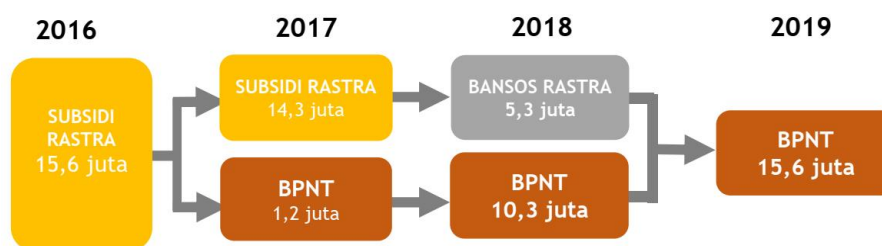
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, 2019.

BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dalam menentukan garis kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar baik makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Indikator kemiskinan lainnya adalah indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan Pemerintah juga sekaligus harus mampu mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan ini. Seperti terlihat pada Tabel 1 di atas, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan tidak begitu signifikan penurunannya dari tahun 2017-2019 baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran rumah tangga miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran di antara rumah tangga miskin juga tidak semakin melebar (BPS, 2019; Bappenas, 2019). Sejumlah literatur yang menghubungkan antara kemiskinan dan pangan menyebutkan bahwa konsumsi pangan seperti beras diperkirakan merupakan komponen pengeluaran terbesar rumah tangga miskin, dapat mencapai sepertiga dari total pengeluaran untuk konsumsinya (Bazzi, *et al.*, 2015; Cahyadi, *et al.*, 2018). Sebuah studi eksperimental bahkan mengklaim bahwa proporsi konsumsi pangan mencapai 61% dari pengeluaran rumah tangga miskin (Banerjee & Duflo, 2012).

Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan pemenuhan kebutuhan dasar, atau kesulitan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan (Cahyat, *et al.*, 2007). Salah satu program terkait dengan pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan adalah *Unconditional Cash Transfer (UCT)* atau bantuan tunai tidak

bersyarat (World Bank, 2017). *UCT* telah terbukti membantu masyarakat miskin dalam menghadapi guncangan sosial-ekonomi karena dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan paling mendesak (Al Izaati, *et al.*, 2020). Selain itu, bantuan tunai tanpa syarat akan menjadi salah satu sumber pendapatan *transitory* (*transitory income*) dalam bahagian *measured income* rumah tangga sebagai pembentuk *permanent income* yang dapat digunakan untuk kegiatan konsumtif dan produktif secara bersamaan (Dwiputri, 2017). Khusus untuk bidang pangan, program RASTRA dan BPNT adalah bantuan sosial dan subsidi pangan yang tepat dan bersifat *unconditional* namun penyalurannya secara non-tunai karena didanai oleh anggaran pemerintah tanpa memerlukan kontribusi dari penerima manfaat (skema non-kontributif) (TNP2K, 2019).

Namun, terdapat pula variabel lain yang dapat mengubah pola pengeluaran konsumsi rumah tangga, seperti utilitas dan pilihan konsumsi, karakteristik demografi, *socio-economic characteristic*, faktor keuangan (perubahan pendapatan dan kekayaan), ekspektasi dan intensitas untuk membelanjakan pendapatan (Syahrudin, 1981). Informasi ini akan menggambarkan pola konsumsi rumah tangga pada jangka waktu tertentu dan masa akan datang, pemerataan kesejahteraan dan menghitung dampak akibat perubahan kebijakan pemerintah. Kajian terhadap pola konsumsi rumah tangga sangat terkait dengan kemiskinan dan kesejahteraan rumah tangga dimana dapat digunakan untuk memahami variabel permintaan yang mempengaruhi konsumsi dan pengaruh dari pendapatan dan harga di suatu negara (Vigani, *et al.*, 2015).



Sumber : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 2019.

Gambar 1. Jumlah Penerima Manfaat RASTRA dan BPNT, 2006-2019

Dalam upaya mengentaskan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan, pemerintah menggunakan berbagai program bantuan sosial dan subsidi bahan pangan. Pada tahun 2016, pemerintah merealisasikan Program Beras Sejahtera atau RASTRA (sebelumnya dikenal sebagai Raskin). Sasaran Program RASTRA adalah berkurangnya beban pengeluaran KPM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/KPM/bulan atau sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Tahun 2017, pemerintah mulai menerapkan secara terbatas pada 44 kota terpilih program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), sebuah skema bantuan sosial pangan untuk keluarga berpenghasilan rendah dalam bentuk *cash transfers* yang dimofidikasi menggantikan skema subsidi bantuan barang langsung (*in-kind transfers*). KPM BPNT mendapatkan akun rekening di bank yang memungkinkan mereka untuk menukar bantuan sebesar Rp. 110.000 dengan manfaat komoditas berupa beras dan telur berkualitas setara dengan nilai tersebut. BPNT merupakan bantuan sosial pangan non-tunai tidak bersyarat (*non-cash food assistance*) telah menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Indonesia dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Pada tahun 2019, jumlah total penerima manfaat mencapai 15,6 juta jiwa KPM (TNP2K, 2019).

Hal inilah yang menjadi pertimbangan bahwa jika sedikit saja terjadi gejolak harga pangan, tingkat kesejahteraan rumah tangga miskin dapat langsung mengalami guncangan dan mengakibatkan tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan semakin menurun. Oleh karena itu, transfer pangan lebih memungkinkan untuk melibatkan faktor ekonomi-politik ketimbang transfer uang (*voucher*) karena tujuan program yang saling berkaitan dan keterlibatan multi aktor. Hal ini

semakin menguatkan urgensi RASTRA dan BPNT sebagai bantuan sosial pangan di Indonesia yang merupakan gabungan (*hybrid*) antara bentuk *voucher* yang dicairkan secara transfer non-tunai namun penerima manfaat tetap mendapatkan bantuan dalam bentuk barang/komoditas (*in kind transfer* atau *food assistance*) yang jenisnya tetap (Fernandez & Hadiwidjaja, 2018; Cahyadi, *et al.*, 2018). Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka sasaran atau kelompok penerima manfaat bantuan pangan RASTRA dan BPNT harus mendapatkan kajian lebih lanjut terkait karakteristik demografi dan sosial-ekonomi. Hal ini tentunya akan berkaitan langsung pada efektifitas penyaluran bantuan pangan yang tepat sasaran, menjadi *database* dalam penyaluran bantuan pangan selanjutnya, dan dapat menjadi referensi dalam kajian penerima dan manfaat bantuan pangan (*unconditional cash transfer*) dalam bentuk *voucher*, *in kind transfer* atau *food assistance* di masa datang.

B. METODE PENELITIAN

Desain penelitian adalah bersifat *descriptive* melalui pendekatan *exploratory research* digunakan untuk mendapatkan penjelasan yang lebih rinci mengenai situasi dan kejadian sebenarnya. Desain ini digunakan untuk menggambarkan hasil interpretasi yang tepat tentang permasalahan yang ada di dalam masyarakat, dan suatu objek dan subjek yang diteliti tanpa adanya rekayasa (Sekaran dan Bougi, 2010) terkait karakteristik demografi dan sosial ekonomi penerima manfaat bantuan sosial Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Sampel dalam penelitian ini adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) dari Kelompok Penerima Manfaat (KPM) program bantuan sosial Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang terdaftar pada *Baseline* Basis Data Terpadu mulai dari 2016 s/d 2019 (TNP2K, 2019) yang terintegrasi berdasarkan kerangka target sampel Blok Sensus (BS) dalam Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Badan Pusat Statistik (BPS) KOR dan Panel Konsumsi Maret 2019 dengan metode *Probability Proportional to size Sampling* (PPS) menggunakan *Linear Systematic Sampling* (LSS) dan teknik *multi stage sampling*. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Perangkat Lunak STATA untuk menghitung distribusi frekuensi, rata-rata, standar deviasi, dan tabulasi silang karakteristik KPM dalam bentuk tabel (statistik deskriptif). Tahapan prosedur pemilihan dan ukuran sampel adalah :

Tabel 2. Seleksi Sampel Rumah Tangga Penerima Manfaat RASTRA dan BPNT

Tahap	Sampel	Prosedur	Ukuran Sampel
Ke-1	Daftar Sampel Blok Sensus (DSBS) Rumah Tangga di Indonesia	a) Melakukan <i>implicit stratification</i> seluruh BS SUSENAS Kor dan Panel Konsumsi Maret 2019 sesuai Sensus Penduduk (SP) 2010 berdasarkan strata kesejahteraan (<i>wealth index</i>). b) Dari <i>master frame</i> 320.000 BS, dipilih 75.000 BS secara PPS dengan persentase sebesar 25% untuk menjadi <i>sampling frame</i> BS. c) Memilih sejumlah (<i>n</i>) BS secara PPS di setiap strata kota dan desa per kabupaten/kota setiap provinsi di Indonesia secara LSS.	320.000 BS dengan tingkat pengembalian responden RT adalah 98,65% dari total BS menjadi 315.672 RT (1.204.466 Individu), yaitu : a) Kota = 130.696 RT (492.098 Individu) b) Desa = 184.976 RT (712.368 Individu)
Ke-2	Daftar Sampel Berdasarkan Pengeluaran per Kapita	a) Memilih sejumlah (<i>n</i>) sampel rumah tangga yang dihasilkan dari LSS dengan <i>implicit stratification</i> berdasarkan garis kemiskinan kota dan desa per kabupaten/kota.	Total BS = 315.672 RT (1.204.466 Individu), dikelompokkan dan diurutkan menjadi : a) Kota : 130.696 RT

Sebulan	<p>b) Memilih sejumlah (n) sampel rumah tangga yang dihasilkan dari setiap strata kota dan desa per kabupaten/kota dan kategori kelompok rumah tangga (p_A, p_o dan p_B) secara PPS. p_A = kelompok RT dengan rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan; p_B = kelompok RT dengan rata-rata pengeluaran di atas garis kemiskinan; dan p_o = kelompok RT dengan rata-rata pengeluaran = garis kemiskinan).</p> <p>c) Mengurutkan pengeluaran per kapita sebulan (exp_cap) rumah tangga di Indonesia dari total BS = 315.672 RT (1.204.466 Individu).</p> <p>d) Mengelompokkan pengeluaran per kapita RT sebulan (exp_cap) menjadi 3 kategori, yaitu : kelompok RT 40% terendah, kelompok RT 40% menengah, dan kelompok RT 20% tertinggi berdasarkan strata kota dan desa pada setiap kabupaten/kota di Indonesia.</p> <p>e) Mengkategorikan rumah tangga sampel hasil <i>rank case</i> dari exp_cap menjadi 2 kelompok RT, yaitu : kelompok RT 40% terendah adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) sebagai <i>treated sample</i> dan RT 20% tertinggi adalah Rumah Tangga Tidak Miskin yang menjadi <i>controlled sample</i>.</p> <p>f) Mengeluarkan rumah tangga sampel yang memiliki pengeluaran per kapita sebulan yaitu kelompok RT 40% menengah karena tidak termasuk dalam <i>treated sample</i>.</p>	<p>40% terendah = 32.282 RT 40% menengah = 49.764 RT 20% tertinggi = 48.650 RT</p> <p>b) Desa : 184.976 RT 40% terendah = 75.560 RT 40% menengah = 79.104 RT 20% tertinggi = 30.312 RT</p> <p>Sehingga, diperoleh rumah tangga sampel berdasarkan pengeluaran per kapita sebulan menurut strata kota dan desa sebanyak 154.313 RT</p> <p>a) Kota = 65.680 RT 40% terendah = 26.561 RT 20% tertinggi = 39.119 RT</p> <p>b) Desa = 88.633 RT 40% terendah = 62.587 RT 20% tertinggi = 26.046 RT</p>	
Ke-3	Kelompok Penerima Manfaat (KPM) RASTRA di Indonesia	<p>Memilih sejumlah (n) sampel berdasarkan kota dan desa per kabupaten/kota dengan kategori kelompok RT 40% pengeluaran per kapita terendah sebagai <i>treated sample</i> yaitu KPM adalah Rumah Tangga Miskin yang menerima bantuan pangan RASTRA dan kelompok RT 20% pengeluaran per kapita tertinggi sebagai <i>controlled sample</i> yaitu Non-KPM adalah Rumah Tangga Tidak Miskin.</p>	<p>Total rumah tangga sampel KPM dan Non-KPM bantuan pangan Beras Kesejahteraan (RASTRA) dari 154.313 RT :</p> <p>a) Kota = 65.680 RT KPM = 3.632 RT Non-KPM = 62.048 RT</p> <p>b) Desa = 88.633 RT</p>

			KPM = 25.070 RT Non-KPM = 63.563 RT
Ke-4	Kelompok Penerima Manfaat (KPM) BPNT di Indonesia	Memilih sejumlah (<i>n</i>) sampel berdasarkan kota dan desa per kabupaten/kota dengan kategori kelompok RT 40% pengeluaran per kapita terendah sebagai <i>treated sample</i> yaitu KPM adalah Rumah Tangga Miskin yang menerima BPNT dan kelompok RT 20% pengeluaran per kapita tertinggi sebagai <i>controlled sample</i> yaitu Kelompok Bukan Penerima Manfaat (Non-KPM) adalah Rumah Tangga Tidak Miskin.	Total rumah tangga sampel KPM) dan Non-KPM BPNT dari 154.313 RT : a) Kota = 65.680 RT KPM = 5.426 RT Non-KPM = 60.254 RT b) Desa = 88.633 RT KPM = 6.373 RT Non-KPM = 82.260 RT

Setiap indikator yang digunakan dalam model penelitian akan mengacu pada kuesioner Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) BPS baik KOR dan MKP Panel Konsumsi Maret Tahun 2019. Adapun definisi dan konsep operasional seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat lebih rinci dalam Tabel 3 berikut :

Tabel 3. Definisi dan Konsep Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi dan Konsep Variabel
Bantuan Sosial Pangan Beras Kesejahteraan (<i>rastra</i>)	Bantuan sosial pangan Beras Sejahtera (RASTRA) yang diberikan kepada rumah tangga miskin berpendapatan 40% terbawah sebagai Kelompok Penerima Manfaat (KPM) atau <i>treated sample</i> , sedangkan rumah tangga yang berpendapatan 20% tertinggi menjadi <i>controlled sample</i> (BPS, 2019, TNP2K, 2019). Pengukuran : Kuesioner Susenas Kor RT, BPS, 2019 Blok XXI : Keterangan Perlindungan Sosial (R2101), Kode : 1 = Ya dan 5 = Tidak menjadi 1 = KPM dan 0 = Non-KPM
Bantuan Pangan Non-Tunai (<i>bpnt</i>)	Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang diberikan kepada rumah tangga miskin berpendapatan 40% terbawah sebagai Kelompok Penerima Manfaat (KPM) atau <i>treated sample</i> , sedangkan rumah tangga yang berpendapatan 20% tertinggi menjadi <i>controlled sample</i> (BPS, 2019, TNP2K, 2019). Pengukuran : Kuesioner Susenas Kor RT, BPS, 2019 Blok XXI : Keterangan Perlindungan Sosial (R2109), Kode : 1 = Ya dan 5 = Tidak menjadi 1 = KPM dan 0 = Non-KPM
Karakteristik Demografi Rumah Tangga Miskin (<i>KD</i>)	Kepala Rumah Tangga (KRT) seorang dari sekelompok anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari atau yang dianggap/ditunjuk sebagai KRT. Anggota Rumah Tangga (ART) yaitu semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga (KRT, suami/istri, anak, menantu, cucu, orang tua/mertua, famili lain, pembantu rumah tangga atau ART lainnya) yang sudah tinggal 6 (enam) bulan atau lebih atau kurang dari 6 (enam) bulan, tetapi berniat menetap (BPS, 2019). Kuesioner Susenas Kor BPS, 2019. Indikator Karakteristik Demografi (KD) adalah :

	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jenis Kelamin KRT (jkKRT) : Blok IV. Keterangan Demografi (R405, jika R403 <i>value</i> = 1) : 1 = Laki-laki dan 2 = Perempuan. 2) Umur KRT (uKRT), Blok IV. Keterangan Demografi (R407, <i>value</i> = <i>tahun</i>) : 1 = < 25 tahun; 2 = 25 – 34 tahun; 3 = 35 – 44 tahun; 4 = 45 – 55 tahun; dan 5 = > 55 tahun. 3) Status Perkawinan (sKRT), Blok IV. Keterangan Demografi (R404) : 1 = Belum Kawin; 2 = Kawin; dan 3 = Cerai. 4) Jumlah ART (jART), Blok III. Ringkasan (R301, <i>value</i> = <i>orang</i>) : 1 = ≤ 4 orang; 2 = 5 – 9 orang; dan 3 = ≥ 10 orang. 5) Tingkat Pendidikan KRT (pKRT), Blok VI. Keterangan Imigrasi, Akta Kelahiran dan Pendidikan (R613, <i>value</i> = <i>tahun</i>) : 1 = Tidak Punya Ijazah; 2 = Tamat SD; 3 = Tamat SMP; 4 = Tamat SMA; 5 = Perguruan Tinggi. 6) Tempat Tinggal RT (ttRT), Blok I. Keterangan Tempat (R105, <i>l</i> = <i>Perkotaan</i> dan 2 = <i>Perdesaan</i>) menjadi 1 = Kota dan 0 = Desa.
Karakteristik Sosial-Ekonomi Rumah Tangga Miskin (KSE)	<p>Rumah Tangga (RT) adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan bersama dari satu dapur. Kondisi sosial yang menjadi indikator sumber daya yang dimiliki rumah tangga untuk melakukan berbagai kegiatan sosial dan ekonomi (BPS, 2019). Kuesioner Susenas Kor BPS, 2019. Indikator Karakteristik Sosial-Ekonomi (KSE) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luas Lantai RT (ltRT), Blok XVIII. Keterangan Perumahan (R1804, <i>value</i> = <i>dalam m² per kapita</i>) : 1 = < 8 m² per kapita; 2 = 8 – 12 m² per kapita; dan 3 = > 12 m² per kapita. 2) Kepemilikan Rumah RT (kpRT), Blok XVIII. Keterangan Perumahan (R1802) : 1 = Milik sendiri; 2 = Kotrak/sewa; 3 = Bebas sewa; 4 = Dinas; dan 5 = Lainnya. 3) Literasi Keuangan (lkRT), Blok VIII. Keterangan Teknologi Informasi, Komunikasi, dan Kepemilikan Tabungan (untuk anggota rumah tangga berumur 5 tahun ke atas) (R808) : 1 = Ya dan 0 = Tidak. 4) Bidang Pekerjaan Utama KRT (bpKRT), Blok VII. Keterangan Ketenagakerjaan (untuk anggota rumah tangga berumur 10 tahun ke atas) (R704) : 1 = Pertanian dan 2 = Non-Pertanian. 5) Status dan Kedudukan Dalam Pekerjaan Utama KRT (skpKRT), Blok VII. Keterangan Ketenagakerjaan (untuk anggota rumah tangga berumur 10 tahun ke atas) (R705) : 1 = Formal dan 2 = Infomal.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan hasil penelitian secara umum berkaitan dengan variabel karakteristik demografi dan sosial-ekonomi Kelompok Penerima Manfaat (KPM) bantuan pangan RASTRA dan BPNT di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini menggunakan data Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Badan Pusat Statistik (BPS) KOR dan Panel Konsumsi Maret tahun 2019 sebanyak 154.313 rumah tangga di Indonesia. Rumah tangga sampel ini dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu Rumah Tangga Miskin (RTM) sebanyak 89.148 RT (57,8%) dengan pengeluaran per kapita 40% terendah sebagai *treated samples* dan Rumah Tangga Tidak Miskin sebanyak 65.165 RT (42,2%) dengan pengeluaran per kapita 20% tertinggi sebagai *controlled samples*. Tabel 4 berikut menunjukkan komposisi dan distribusi rumah tangga yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan tempat tinggal RT (desa dan kota kota di Indonesia), pola pengeluaran konsumsi, dan status kemiskinan menurut kelompok pengeluaran per kapita. Berdasarkan data KOR SUSENAS tahun 2019, Garis Kemiskinan yang ditetapkan BPS Indonesia untuk Perkotaan adalah sebesar Rp.

442.062,- per kapita/bulan dan Pedesaan Rp. 404.398,- per kapita/bulan. Angka tersebut mendefinisikan besarnya biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum baik pengeluaran makanan dan non-makanan per kapita/bulan. Suatu rumah tangga dikategorikan miskin jika rata-rata pengeluaran konsumsi untuk makanan dan non makanan rumah tangga kurang dari Garis Kemiskinan tersebut ataupun sebaliknya. Semakin tinggi persentase RTM di suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan di daerah tersebut (Cahyadi, *et al.*, 2018; Adani & Maulana, 2019). Namun, tingkat kemiskinan suatu daerah tidak hanya terfokus pada angka saja, melainkan pada karakteristik yang dapat menyebabkan kemiskinan itu terjadi (Alkire dan Foster, 2011).

Berdasarkan Tabel 4 di bawah ini dapat disimpulkan bahwa komposisi rumah tangga sampel secara keseluruhan berdasarkan wilayah tempat tinggal, mayoritas adalah di Pedesaan sebanyak 88.633 RT (57,4%) dan 65.680 RT (42,6%) bertempat tinggal di Perkotaan serta terdapat 62.587 (70,2%) dari total RT sampel adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang bertempat tinggal di Pedesaan. Secara rinci, komposisi tersebut terbagi dalam 2 (dua) kelompok RT menurut pola pengeluaran konsumsi, mayoritas rumah tangga di Indonesia lebih banyak mengalokasikan pengeluarannya untuk belanja makanan dibanding non-makanan ($\geq 50\%$) sebanyak 105.531 RT (68,4%), 80.397 (90,2%) RTM memiliki pola pengeluaran konsumsi yang lebih banyak terhadap makanan dibanding non-makanan. Sementara 40.031 (67,4%) lainnya yaitu Rumah Tangga Tidak Miskin (kelompok pengeluaran per kapita 20% tertinggi) lebih banyak mengalokasikan pengeluarannya untuk non-makanan dibanding makanan dimana proporsi pengeluaran makanan terhadap total pengeluaran konsumsi $< 50\%$. Jika dilihat dari status kemiskinan rumah tangga berdasarkan garis kemiskinan kota dan desa di Indonesia tahun 2019, maka terdapat 23.209 (15,0%) RT adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) dan 131.104 (85,0%) RT adalah Rumah Tangga Tidak Miskin menurut kategori pengeluaran per kapita 40% terbawah dan 20% tertinggi.

Tabel 4. Komposisi RT Sampel Menurut Kelompok Pengeluaran Per Kapita

Karakteristik Rumah Tangga Sampel	Kelompok Pengeluaran Per Kapita		Total (N,%)
	Treatment (N,%)	Control (N,%)	
Wilayah Tempat Tinggal RT			
Perdesaan	62.587 (70,2)	26.046 (40,0)	88.633 (57,4)
Perkotaan	26.561 (29,8)	39.119 (60,0)	65.650 (42,6)
Pola Pengeluaran Konsumsi			
Proporsi Makanan Terhadap Total Pengeluaran $\geq 50\%$	80.397 (90,2)	25.134 (38,6)	105.531 (68,4)
Proporsi Makanan Terhadap Total Pengeluaran $< 50\%$	8.751 (9,8)	40.031 (67,4)	48.782 (31,6)
Status Kemiskinan			
Rumah Tangga Miskin	23.209 (26,0)	0 (0,0)	23.209 (15,0)
Rumah Tangga Tidak Miskin	65.939 (74,0)	65.165 (100)	131.104 (85,0)
Total Rumah Tangga Sampel	89.148 (57,8)	65.165 (42,2)	154.313 (100)

Sumber : BPS, Raw Data SUSENAS, 2019, Diolah.

Karakteristik Demografi Kelompok Penerima Manfaat RASTRA dan BPNT

Secara keseluruhan KPM RASTRA berjumlah sebanyak 28.702 (18,6%) dan Non-KPM berjumlah sebanyak 125.611 (81,4%) sedangkan KPM BPNT berjumlah sebanyak 11.7999 (7,6%)

dan Non-KPM sebanyak 142.514 (92,4%) menurut kelompok pengeluaran per kapita 40% terbawah sebagai *treated sample* dan 20% tertinggi sebagai *controlled sample*. Karakteristik demografi KPM RASTRA, mayoritas adalah laki-laki sebagai kepala rumah tangga sebanyak 25.546 (89,0%) dengan usia berkisar antara 35-44 tahun sebanyak 8.981 (31,3%), telah menikah sebanyak 24.754 (86,3%) dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga ≤ 4 orang sebanyak 14.546 (50,7%), memiliki tingkat pendidikan rata-rata tamatan SD sebanyak 10.910 (38,0%), dan bertempat tinggal di Perdesaan sebanyak 25.070 (87,3%) (Lihat Tabel 5). Karakteristik demografi KPM BPNT, mayoritas adalah laki-laki sebagai kepala rumah tangga sebanyak 10.570 (89,6%) dengan usia berkisar antara 45-55 tahun sebanyak 4.243 (36,0%), telah menikah sebanyak 10.305 (87,3%) dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga ≤ 4 orang sebanyak 6.910 (58,5%), tingkat pendidikan rata-rata tamatan SD sebanyak 5.402 (45,8%), dan bertempat tinggal di Perdesaan sebanyak 6.373 (54,0%) (Lihat Tabel 6).

Tabel 5. Karakteristik Demografi Kelompok Penerima Manfaat RASTRA

Karakteristik Demografi KPM Bantuan Pangan RASTRA			Kelompok Pengeluaran Per Kapita (N,%)		Total (N,%)
			<i>Treatment</i>	<i>Control</i>	
Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga	KPM 28.702 (18,6)	Laki-laki	22.277 (89,8)	3.269 (83,7)	25.546 (89,0)
		Perempuan	2.520 (10,2)	636 (16,3)	3.156 (11,0)
	Non-KPM 125.611 (81,4)	Laki-laki	58.543 (91,0)	53.641 (87,6)	112.184 (89,3)
		Perempuan	5.808 (9,0)	7.619 (12,4)	13.247 (10,7)
Usia Kepala Rumah Tangga	KPM 28.702 (18,6)	< 25 Tahun	431 (1,7)	161 (4,1)	592 (2,1)
		25-34 Tahun	3.230 (13,0)	554 (14,2)	3.784 (13,2)
		35-44 Tahun	8.076 (32,6)	905 (23,2)	8.981 (31,3)
		45-55 Tahun	7.561 (30,5)	1.209 (31,0)	8.770 (30,6)
	Non-KPM 125.611 (81,4)	> 55 Tahun	5.499 (22,2)	1.076 (27,5)	6.575 (22,8)
		< 25 Tahun	1.175 (1,8)	2.461 (4,0)	3.636 (2,9)
		25-34 Tahun	9.228 (14,4)	8.676 (14,2)	17.904 (14,3)
		35-44 Tahun	19.846 (30,8)	15.930 (26,0)	35.776 (28,5)
Status Perkawinan Kepala Rumah Tangga	KPM 28.702 (18,6)	Belum Kawin	220 (0,9)	188 (4,8)	408 (1,4)
		Kawin	21.909 (88,3)	2.845 (72,9)	24.754 (86,3)
		Cerai	2.668 (10,8)	872 (22,3)	3.540 (12,3)
	Non-KPM 125.611 (81,4)	Belum Kawin	590 (0,9)	4.141 (6,8)	4.731 (3,8)
		Kawin	57.455 (89,3)	48.667 (79,4)	106.122 (84,5)
		Cerai	6.306 (9,8)	8.452 (13,8)	14.758 (11,7)
Jumlah Anggota Rumah Tangga	KPM 28.702 (18,6)	≤ 4 Orang	11.104 (44,8)	3.442 (88,1)	14.546 (50,7)
		5-9 Orang	13.201 (53,2)	460 (11,8)	13.661 (47,6)
		≥ 10 Orang	492 (2,0)	3 (0,1)	495 (1,7)
	Non-KPM 125.611	≤ 4 Orang	36.392 (57,0)	51.001 (83,3)	87.693 (69,8)

Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga	(81,4)	5-9 Orang	27.014 (42,0)	10.174 (16,6)	37.188 (29,6)
		≥ 10 Orang	645 (1,0)	85 (0,1)	730 (0,6)
	KPM 28.702 (18,6)	Tidak Punya Ijazah	7.422 (29,9)	852 (21,8)	8.274 (28,8)
		Tamat SD	9.661 (39,0)	1.249 (32,0)	10.910 (38,0)
		Tamat SMP	4.081 (16,5)	727 (18,6)	4.808 (16,8)
		Tamat SMA	3.308 (13,3)	858 (22,0)	4.166 (14,5)
		Perguruan Tinggi	325 (1,3)	219 (5,6)	544 (1,9)
		Tidak Punya Ijazah	14.113 (21,9)	5.481 (8,9)	19.594 (15,6)
	Non-KPM 125.611 (81,4)	Tamat SD	25.595 (38,2)	9.689 (15,9)	34.284 (27,3)
		Tamat SMP	11.841 (18,4)	8.235 (13,4)	20.076 (16,0)
Tamat SMA		12.150 (18,9)	22.297 (36,4)	34.447 (27,4)	
Perguruan Tinggi		1.652 (2,6)	15.558 (25,4)	17.210 (13,7)	
Tempat Tinggal Kepala Rumah Tangga	KPM 28.702 (18,6)	Perdesaan	21.746 (87,7)	3.324 (85,1)	25.070 (87,3)
		Perkotaan	3.051 (12,3)	581 (14,9)	3.632 (12,7)
	Non-KPM 125.611 (81,4)	Perdesaan	40.841 (63,5)	22.722 (37,1)	63.563 (50,6)
		Perkotaan	23.510 (36,5)	38.578 (62,9)	62.048 (49,4)
Total Rumah Tangga Sampel			89.148 (57,8)	65.165 (42,2)	154.313 (100)

Sumber : BPS, Raw Data SUSENAS, 2019, Diolah.

Tabel 6. Karakteristik Demografi Kelompok Penerima Manfaat BPNT

	Karakteristik Demografi KPM Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)		Kelompok Pengeluaran Per Kapita (N,%)		Total (N,%)
			<i>Treatment</i>	<i>Control</i>	
Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga	KPM 11.799 (7,6)	Laki-laki	9.670 (90,4)	900 (82,0)	10.570 (89,6)
		Perempuan	1.032 (9,6)	197 (18,0)	1.229 (10,4)
	Non-KPM 142.514 (92,4)	Laki-laki	71.150 (90,7)	56.010 (87,4)	127.160 (89,2)
		Perempuan	7296 (9,3)	8.058 (12,6)	15.354 (10,8)
Usia Kepala Rumah Tangga	KPM 11.799 (7,6)	< 25 Tahun	45 (0,4)	19 (1,7)	64 (0,5)
		25-34 Tahun	798 (7,5)	53 (4,8)	851 (7,2)
		35-44 Tahun	3.152 (29,5)	239 (21,8)	3.391 (28,7)
		45-55 Tahun	3.786 (35,4)	457 (41,7)	4.243 (36,0)
	> 55 Tahun	2.921 (27,2)	329 (30,0)	3.250 (27,6)	
	Non-KPM 142.514 (92,4)	< 25 Tahun	1.561 (2,0)	2.603 (4,1)	4.146 (2,9)
25-34 Tahun		11.660 (14,9)	9.177 (14,3)	20.837 (14,6)	
		35-44 Tahun	24.770 (31,6)	16.596 (25,9)	41.366 (29,1)

		45-55 Tahun	22.410 (28,5)	21.638 (33,8)	44.048 (30,9)
		> 55 Tahun	18.045 (23,0)	14.054 (21,9)	32.099 (22,5)
Status Perkawinan Kepala Rumah Tangga	KPM 11.799 (7,6)	Belum Kawin	88 (0,8)	38 (3,5)	126 (1,1)
		Kawin	9.508 (88,8)	797 (72,7)	10.305 (87,3)
		Cerai	1.106 (10,4)	262 (23,8)	1.368 (11,6)
	Non-KPM 142.514 (92,4)	Belum Kawin	722 (0,9)	4.291 (6,7)	5.013 (3,5)
		Kawin	69.856 (89,0)	50.715 (79,2)	120.571 (84,6)
		Cerai	7.868 (10,1)	9.062 (14,1)	16.930 (11,9)
Jumlah Anggota Rumah Tangga	KPM 11.799 (7,6)	≤ 4 Orang	5.987 (55,9)	923 (84,1)	6.910 (58,5)
		5-9 Orang	4.614 (43,2)	173 (15,8)	4.787 (40,6)
		≥ 10 Orang	101 (0,9)	1 (0,1)	102 (0,9)
	Non-KPM 142.514 (92,4)	≤ 4 Orang	41.809 (53,3)	53.520 (83,5)	95.329 (66,9)
		5-9 Orang	35.601 (45,4)	10.461 (16,3)	46.062 (32,3)
		≥ 10 Orang	1.036 (1,3)	87 (0,2)	1.123 (0,8)
Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga	KPM 11.799 (7,6)	Tidak Punya Ijazah	3.082 (28,8)	283 (25,8)	3.365 (28,5)
		Tamat SD	4.976 (46,5)	426 (38,8)	5.402 (45,8)
		Tamat SMP	1.697 (15,9)	204 (18,6)	1.901 (16,1)
		Tamat SMA	920 (8,6)	170 (15,5)	1.090 (9,2)
		Perguruan Tinggi	27 (0,2)	14 (1,3)	41 (0,4)
		Tidak Punya Ijazah	18.453 (23,5)	6.050 (9,4)	24.503 (17,2)
	Non-KPM 142.514 (92,4)	Tamat SD	29.282 (37,3)	10.512 (16,4)	39.792 (27,9)
		Tamat SMP	14.225 (18,2)	8.758 (13,7)	22.983 (16,2)
		Tamat SMA	14.538 (18,5)	22.985 (35,9)	37.523 (26,3)
		Perguruan Tinggi	1.950 (2,5)	15.763 (24,6)	17.713 (12,4)
Tempat Tinggal Kepala Rumah Tangga	KPM 11.799 (7,6)	Perdesaan	5.936 (55,5)	437 (39,8)	6.373 (54,0)
		Perkotaan	4.766 (44,5)	660 (60,2)	5.426 (46,0)
	Non-KPM 142.514 (92,4)	Perdesaan	56.651 (72,2)	25.609 (40,0)	82.260 (57,7)
		Perkotaan	21.795 (27,8)	38.459 (60,0)	60.254 (42,3)
Total Rumah Tangga Sampel			89.148 (57,8)	65.165 (42,2)	154.313 (100)

Sumber : BPS, Raw Data SUSENAS, 2019, Diolah.

Karakteristik Sosial-Ekonomi Kelompok Penerima Manfaat RASTRA dan BPNT

Secara umum karakteristik sosial-ekonomi KPM RASTRA, mayoritas memiliki luas lantai sebagai tempat tinggal anggota rumah tangga lebih dari 12 m² per kapita sebanyak 13.110 (45,7%), dengan kepemilikan rumah adalah milik sendiri sebanyak 25.897 (90,2%), tidak memiliki akses

terhadap keuangan inklusif sebanyak 21.562 (75,1%), dengan bidang pekerjaan utama dari kepala rumah tangga bergerak di sektor pertanian sebanyak 19.522 (68,0%), dan berstatus informal sebanyak 22.603 (78,8) (Lihat Tabel 7). Sedangkan karakteristik sosial-ekonomi KPM BPNT, mayoritas memiliki luas lantai sebagai tempat tinggal anggota rumah tangga lebih dari 12 m² per kapita sebanyak 7.148 (60,6%), dengan kepemilikan rumah adalah milik sendiri sebanyak 10.258 (86,9%), tidak memiliki akses terhadap keuangan inklusif sebanyak 9.082 (77,0%), dengan bidang pekerjaan utama dari kepala rumah tangga bergerak di sektor non-pertanian sebanyak 6.475 (54,9%), dan berstatus non-formal 8.138 (69,0%) (Lihat Tabel 8).

Tabel 7. Karakteristik Sosial-Ekonomi Kelompok Penerima Manfaat RASTRA

Karakteristik Sosial-Ekonomi KPM Bantuan Pangan RASTRA			Kelompok Pengeluaran Per Kapita (N,%)		Total (N,%)	
			<i>Treatment</i>	<i>Control</i>		
Luas Lantai Rumah Tangga	KPM 28.702 (18,6)	< 8 m ² per kapita	7.475 (30,1)	256 (6,6)	7.731 (26,9)	
		8-12 m ² per kapita	7.362 (29,7)	499 (12,8)	7.861 (27,4)	
		> 12 m ² per kapita	9.960 (40,2)	3.150 (80,6)	13.110 (45,7)	
	Non-KPM 125.611 (81,4)	< 8 m ² per kapita	12.240 (19,0)	3.100 (5,1)	15.340 (12,2)	
		8-12 m ² per kapita	15.405 (23,9)	5.726 (9,3)	21.131 (16,8)	
		> 12 m ² per kapita	36.706 (57,1)	52.434 (85,6)	89.140 (71,0)	
Kepemilikan Rumah	KPM 28.702 (18,6)	Milik Sendiri	22.376 (90,2)	3.521 (90,2)	25.897 (90,2)	
		Kontrak/Sewa	344 (1,4)	72 (1,8)	416 (1,5)	
		Bebas Sewa	1.957 (7,9)	272 (7,0)	2.229 (7,8)	
	Non-KPM 125.611 (81,4)	Dinas	37 (0,2)	31 (0,8)	68 (0,2)	
		Lainnya	83 (0,3)	9 (0,2)	92 (0,3)	
		Milik Sendiri	54.020 (83,9)	45.931 (75,0)	99.951 (79,6)	
Literasi Keuangan Kepala Rumah Tangga	KPM 28.702 (18,6)	Memiliki	5.406 (21,8)	1.734 (44,4)	7.140 (24,9)	
		Tidak Memiliki	19.391 (78,2)	2.171 (55,6)	21.562 (75,1)	
		Memiliki	17.025 (26,5)	45.492 (74,3)	62.517 (49,8)	
	Non-KPM 125.611 (81,4)	Tidak Memiliki	47.326 (73,5)	15.768 (25,7)	63.094 (50,2)	
		KPM 28.702 (18,6)	Pertanian	17.434 (70,3)	2.088 (53,5)	19.522 (68,0)
			Non-Pertanian	7.363 (29,7)	1.817 (46,5)	9.180 (32,0)
Non-KPM 125.611 (81,4)	Pertanian	32.776 (50,9)	11.429 (18,7)	44.205 (35,2)		
	Non-Pertanian	31.575 (49,1)	49.831 (81,3)	81.406 (64,8)		

Status dan Kedudukan	KPM	Formal	4.945 (19,9)	1.154 (29,6)	6.099 (21,2)
	28.702 (18,6)	Informal	19.852 (80,1)	2.751 (70,4)	22.603 (78,8)
Dalam Pekerjaan Utama Kepala RT	Non-KPM	Formal	19.755 (30,7)	36.236 (59,2)	55.991 (44,6)
	125.611 (81,4)	Informal	44.595 (63,3)	25.024 (40,8)	69.620 (55,4)
Total Rumah Tangga Sampel			89.148 (57,8)	65.165 (42,2)	154.313 (100)

Sumber : BPS, Raw Data SUSENAS, 2019, Diolah.

Tabel 7. Karakteristik Sosial-Ekonomi Kelompok Penerima Manfaat BPNT

Karakteristik Sosial-Ekonomi KPM Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)			Kelompok Pengeluaran Per Kapita (N,%)		Total (N,%)
			<i>Treatment</i>	<i>Control</i>	
Luas Lantai Rumah Tangga	KPM 11.799 (7,6)	< 8 m ² per kapita	1.888 (17,6)	103 (9,4)	1.991 (16,9)
		8-12 m ² per kapita	2.516 (23,6)	144 (13,1)	2.660 (22,5)
		> 12 m ² per kapita	6.298 (58,8)	850 (77,5)	7.148 (60,6)
	Non-KPM 142.514 (92,4)	< 8 m ² per kapita	17.827 (22,7)	3.253 (5,1)	21.080 (14,8)
		8-12 m ² per kapita	20.251 (25,8)	6.081 (9,5)	26.332 (18,5)
		> 12 m ² per kapita	40.368 (51,5)	54.734 (85,4)	95.102 (66,7)
Kepemilikan Rumah	KPM 11.799 (7,6)	Milik Sendiri	9.334 (87,2)	924 (84,2)	10.258 (86,9)
		Kontrak/Sewa	344 (3,2)	68 (6,2)	412 (3,5)
		Bebas Sewa	993 (9,3)	101 (9,2)	1.094 (9,3)
		Dinas	13 (0,1)	1 (0,1)	14 (0,1)
		Lainnya	18 (0,2)	3 (0,3)	21 (0,2)
	Non-KPM 142.514 (92,4)	Milik Sendiri	67.062 (85,5)	48.528 (75,7)	115.590 (81,1)
		Kontrak/Sewa	3.117 (4,0)	7.646 (11,9)	10.763 (7,6)
		Bebas Sewa	7.564 (9,6)	5.414 (8,5)	12.978 (9,1)
Literasi Keuangan Kepala Rumah Tangga	KPM 11.799 (7,6)	Memiliki	2.277 (21,3)	440 (40,1)	2.717 (23,0)
		Tidak Memiliki	8.425 (78,7)	657 (59,9)	9.082 (77,0)
	Non-KPM 142.514 (92,4)	Memiliki	20.154 (25,7)	46.786 (73,0)	66.940 (47,0)
		Tidak Memiliki	58.292 (74,3)	17.282 (27,0)	75.574 (53,0)
Bidang Pekerjaan Utama Kepala Rumah Tangga	KPM 11.799 (7,6)	Pertanian	4.995 (46,7)	329 (30,0)	5.324 (45,1)
		Non-Pertanian	5.707 (53,3)	768 (70,0)	6.475 (54,9)
	Non-KPM 142.514 (92,4)	Pertanian	45.215 (57,6)	13.188 (20,6)	58.403 (41,0)
		Non-Pertanian	33.231 (42,4)	50.880 (79,4)	84.111 (59,0)

Status dan Kedudukan	KPM	Formal	3.227 (30,2)	434 (39,6)	3.661 (31,0)
	11.799 (7,6)	Non-Formal	7.475 (69,8)	663 (60,4)	8.138 (69,0)
Dalam Pekerjaan Utama Kepala RT	Non-KPM	Formal	21.473 (27,4)	36.956 (57,7)	58.429 (41,0)
		Non-Formal	56.973 (72,6)	27.112 (42,3)	84.085 (59,0)
Total Rumah Tangga Sampel			89.148 (57,8)	65.165 (42,2)	154.313 (100)

Sumber : BPS, Raw Data SUSENAS, 2019, Diolah.

Pembahasan

Karakteristik demografi KPM RASTRA dan BPNT di atas mengindikasikan bahwa tulang punggung keluarga KPM masih bertumpu pada laki-laki sebagai kepala keluarga namun masih dalam usia produktif 25-55 tahun dan telah menikah, meskipun ada kecenderungan beban keluarga akan berpindah pada perempuan sebagai kepala keluarga karena banyaknya angka perceraian. Akan tetapi, realitas jumlah anggota rumah tangga KPM masih tergolong keluarga inti (tidak terlalu banyak), maka kecenderungan beban pengeluaran rumah tangga akan semakin berkurang. Sebagian KPM masih mengandalkan sektor pertanian sebagai lapangan pekerjaan utama. Meskipun, usaha *non-farm* dan *off-farm* tetap menjadi sumber pendapatan komplementer atau alternatif bagi keluarga khususnya di Perdesaan. Berbeda dengan KPM di Perkotaan yang lebih banyak yang mengandalkan penghasilan dari sektor jasa akibat dari rendahnya kesempatan di sektor lain karena tidak memiliki modal dan kemampuan cukup atau lebih dikenal dengan sektor informal. Mereka yang terjun ke sektor ini pada umumnya tidak bermaksud untuk tetap berkerja di sana, tetapi merupakan cara untuk *survive* sambil mengincar peluang yang lebih baik. Dengan demikian, jika rumah tangga tergolong kelompok miskin maka dapat dilihat sebagai suatu proses, bukan miskin sebagai akibat semata-mata (Cahyat, *et al.*, 2007).

Karakteristik demografi RTM sebagai KPM RASTRA dan BPNT menunjukkan masih rendahnya tingkat pendidikan kepala rumah tangga (tamatan SD). Kenyataan ini disebabkan oleh karena ketidakmampuannya dalam mengakses layanan pendidikan yang lebih tinggi dan mengakibatkan tingginya angka kemiskinan secara struktural yang berimbas pada banyaknya anggota rumah tangga tidak dapat juga mengakses pendidikan karena pada saat yang sama kepala rumah tangga masuk dalam kategori miskin. Akan tetapi, ada pula pendapat lain yang menyatakan bahwa rumah tangga miskin tidak selalu memiliki anggota yang lebih banyak (Sumarto & Silva, 2014). Hal ini disebabkan mereka telah menerima norma keluarga kecil, sejahtera, bahagia. Dengan kata lain rumah tangga miskin menerapkan norma tersebut agar tidak memiliki beban yang terlalu berat yang merupakan fenomena kemiskinan sebagai suatu proses (Cahyat, *et al.*, 2007). Pendapat lain juga mengatakan bahwa kemiskinan merupakan suatu akibat. Dalam hal ini rumah tangga yang tadinya tidak miskin maupun yang miskin terbebani antara lain oleh jumlah anggota keluarga tidak produktif. Bila pendapatan rumah tangga tidak meningkat sejajar dengan beban pengeluarannya maka rumah tangga itu akan menjadi miskin atau semakin miskin atau kemiskinan situasional (Todaro, 2003).

Karakteristik sosial-ekonomi KPM RASTRA dan BPNT secara umum telah memiliki tempat tinggal yang layak dari sisi luas lantai per kapita dengan status miliki sendiri sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Kementerian Kesehatan dan BPS Indonesia mensyaratkan bahwa rumah sehat dengan luas lantai per kapita minimal 8 m² sedangkan WHO mensyaratkan bahwa luas lantai per kapita untuk rumah sehat adalah minimal 10 m² (BPS, 2019). Hal ini disebabkan KPM RASTRA dan BPNT lebih banyak di Perdesaan, karena luas lantai rumah di Perdesaan pada umumnya lebih luas dibanding di perkotaan (ketersediaan lahan untuk tinggal dan rata-rata milik keluarga besar). Namun, RTM pada umumnya memiliki rumah dengan luas lantai yang lebih sempit dan kualitas lantai yang kurang memadai dibanding rumah tangga tidak miskin atau bukan luas lantai yang menjadi karakteristik RTM tetapi lebih kepada jenis lantainya.

Di sisi lain, masih sedikitnya KPM RASTRA dan BPNT yang memiliki akses terhadap layanan keuangan (kepemilikan rekening), padahal program tersebut ditujukan salah satunya adalah untuk meningkatkan RTM yang melek digital dan kepemilikan rekening saldo dalam pencairan voucher bantuan pangan sehingga dapat ditabung ataupun digunakan untuk membeli kebutuhan bahan pangan dan barang lainnya (TNP2K, 2019).

D. KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil kajian ini adalah karakteristik demografi dan sosial-ekonomi dari KPM RASTRA dan BPNT tidak begitu memiliki perbedaan, hanya dari sisi usia pada KPM RASTRA masih pada usia produktif sedangkan KPM BPNT sudah memasuki usia tidak produktif dan dari sisi bidang pekerjaan utama kepala rumah tangga KPM RASTRA di sektor pertanian sedangkan KPM BPNT di sektor non-pertanian. Secara umum, karakteristik demografi KPM RASTRA dan BPNT mayoritas adalah laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan telah menikah, memiliki rata-rata jumlah anggota rumah tangga layaknya keluarga inti, rata-rata tamatan SD, dan bertempat tinggal di Perdesaan. Sedangkan karakteristik sosial-ekonomi KPM RASTRA dan BPNT mayoritas memiliki luas lantai tempat tinggal anggota rumah tangga telah layak huni, tidak memiliki akses terhadap keuangan inklusif, dan status pekerjaan kepala rumah tangga adalah informal.

E. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan rekomendasi berikut : 1). Pengentasan kemiskinan di Indonesia melalui program bantuan pangan baik RASTRA dan BPNT hendaknya dapat dilakukan pemilihan Kelompok Penerima Manfaat yang lebih tepat sasaran sesuai dengan karakteristik demografi dan sosial ekonomi rumah tangga; 2). Masih banyaknya KPM RASTRA dan BPNT berada pada kelompok pengeluaran 20% tertinggi (kemiskinan relatif), sehingga diperlukan evaluasi program dan kebijakan di masa datang; 3) Karakteristik usia dan bidang pekerjaan menjadi indikator yang berbeda pada kedua KPM bantuan pangan, sehingga diperlukan jenis bantuan lain seperti ketersediaan lapangan pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja khususnya di sektor non-pertanian dan bersifat informal ataupun jaminan hari tua bagi RTM; 4) Menyediakan layanan pendidikan yang lebih terjangkau dan berkualitas sehingga dapat menghasilkan anggota rumah tangga sebagai tenaga kerja terbebas dari kemiskinan kultural; dan 5) Memberikan edukasi dan ketersediaan fasilitas akan pentingnya akses terhadap layanan keuangan (melek digital) dan manfaatnya dalam berbagai kegiatan usaha RT.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Al Izzati, R., Suryadarma, D., and Suryahadi, A. 2020. *The Behavioral Effects of Unconditional Cash Transfers: Evidence from Indonesia*. The SMERU Research Institute.
- Alkire, S, and J. Foster. 2011. *Counting and Multidimensional Poverty Measurement*. Journal of Public Economics. Vol. 95 (7-8) : 476-87.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Statistik Indonesia Tahun 2019*. ISSN : 0126-2912.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2019. *Perlindungan Sosial di Indonesia : Tantangan dan Arah ke Depan*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Dir. Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat. Jakarta. ISBN : 978-602-17638-2-7.
- Bazzi, Samuel, Sudarno Sumarto, and Asep Suryahadi. 2015. *It's All in The Timing : Cash Transfers and Consumption Smoothing in a Developing Country*. Journal of Economic Behavior and Organization. Vol. 119. p. 267–288.
- Banerjee, A. V., and Duflo, E. 2012. *Poor Economics : A Radical Rethinking of The Way to Fight Global Poverty*. Paperback Edition. New York. Public Affairs.
- Cahyadi, N., Hanna, R., Olken, B.A., Prima, R.A., Satriawan, and E., Syamsulhakim, E. 2018. *Cumulative Impacts Of Conditional Cash Transfer Programs: Experimental Evidence From Indonesia*. TNP2K Working Paper 4. Jakarta, Indonesia.

- Cahyat, A., Christian, G., dan Michaela, H. 2007. *Mengkaji Kemiskinan dan Kesejahteraan Rumah Tangga : Sebuah Panduan dengan Contoh dari Kutai Barat, Indonesia*. Bogor. Center for International Forestry Research (CIFOR).
- Dwiputri, Inayati, N. 2017. *The Impact of The Unconditional Cash Transfer Program (BLT) on Cigarette Consumption in Indonesian Society*. Journal of Indonesian Economy and Business. Vol. 32. No. 2. p. 138-150.
- Fernandez, L., and Hadiwidjaja, G. 2018. *Do Household Socioeconomic and Characteristics Change Over a 3 Year Period in Indonesia? Evidence From SUSENAS Panel 2008-2010*. TNP2K. Working Paper Series 3. Jakarta, Indonesia.
- Romer, David, 2012, *Advanced Macroeconomics, 4th ed.* The University of California, Berkeley, The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Sekaran, U., and Bougie, R. 2010. *Research Methods for Business : A Skill-Building Approach (5th Ed.)*. Haddington: John Wiley & Sons.
- Sumarto, S., Marc Vothknecht, Laura Wijaya, 2014. *Explaining the Regional Heterogeneity of Poverty: Evidence from Decentralized Indonesia*. Working Paper Series. The SmeRu Research Institute and National Team for the Acceleration of Poverty Reduction.
- Syahrudin. 1981. *Fungsi Konsumsi : Kenyataannya di Sumatera Barat*. Ekonomi Kebijakan Indonesia, Vol. XXIX. No. 2. June 1981.
- Timmer, C., P. Falcon, W. P., and Pearson, S. R. 1983. *Food policy Analysis*. Baltimore : Johns Hopkins University Press. p. 43. ISBN : 0-8018-3072-9.
- TNP2K. 2019. *Indonesia's Unified Database for Social Protection Programmes : Management Standards*. Jakarta. National Team for the Acceleration of Poverty Reduction.
- Vigani, M., Parisi, C., Rodriguez, CE., Barbosa, M.J., Sijtsma, L., Ploeg, M., Enzing, C. 2015. *Food and Feed Products from Micro-Algae: Market Opportunities and Challenges for The EU*. Trends in Food Science & Technology. Vol. 42 (1).
- World Bank. 2017. *Towards a Comprehensive, Integrated and Effective Social Assistance System in Indonesia : Indonesia's Social Assistance Public Expenditure Review Update*, Jakarta. World Bank.